

Pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak (Studi Sekolah Dasar Negeri 182) Kota Pekanbaru

Agnes Khairani Fauziah¹Evi Zubaidah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
agneskhairanifauziah@student.uir.ac.id evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : February 28, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

Child is generation successor nation in need protection law as effort protection to freedom And right basic related children _ with his welfare . Resolution from fulfillment right child Wrong the only one through school friendly child . School friendly child is a program based unit education in protect And fulfil fulfillment right child to violence physique And psychic in world education . Study This done For analyze And explain about maintenance school friendly children at school basic state 182 cities Pekanbaru . Type study This use method qualitative with use technique data collection via results observation , interview And documentation . In study This use theory implementation which has 6 dimensions research . Results study This showing that lack of availability source Power humans , less availability means And infrastructure in the implementation process school friendly children , less communication between organization from party service with party a school so that happen no hatrack message between organization . By Because That party service must more notice And provide source Power human , means And infrastructure in administration school friendly child And increase communication between organizations.

Keywords : *Implementation, Program, Fulfillment Right Children , Child Friendly Schools*

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya . Resolusi dari menyediakan hak anak salah kecuali melalui sekolah ramah anak . Sekolah ramah anak merupakan program berbasis satuan pendidikan dalam melindungi dan memenuhi menyediakan hak anak terhadap kekerasan fisik dan psikologis dalam dunia pendidikan . Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang hal sekolah ramah anak di sekolah dasarnegeri 182 kota Pekanbaru . Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik Pengumpulan data melalui hasil observasi , wawancara dan dokumentasi . Dalam penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan yang memiliki 6 dimensi penelaian . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang ketersediaan sumber daya manusia , kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan sekolah ramah anak ,kurangnya komunikasi antar organisasi dari pihak dinas dengan pihak mencariolah sehingga terjadinya ketidaksempurnaan sampaian pesan antar organisasi . Oleh karena itu pihak dinas harus lebih memperhatikan dan menyediakan sumber daya manusia , sarana dan prasarana dalam peneyelenggaraan sekolah ramah anak dan meningkatkan komunikasi antar organisasi .

Kata kunci: *Pelaksanaan , Program, Pemenuhan Benar Anak, Sekolah Ramah Anak*

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sekolah ramah anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 ayat 1 yang berbunyi "(1) anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain". Di ayat 2 dinyatakan sebagai berikut "perlindungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, Aparat dinyatakan sebagai berikut pemerintah atau masyarakat. Selain itu adanya program sekolah ramah anak juga dilatar belakangi adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di Sekolah.

Menurut Rahmayuni (2017), ketidakmampuan anak dalam mempertahankan haknya karena ketidakmatangan mental dan fisiknya dari berbagai macam tindakan yang mengakibatkan kemunduran mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga memunculkan kebutuhan perlindungan anak melalui kontribusi dan komitmen pemerintah serta masyarakat untuk membangun sebuah kehidupan dan penghidupan yang aman bagi anak. Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa fenomena yaitu adanya kekerasan fisik Maupun psikis terhadap anak dalam dunia Pendidikan sebanyak 36,68 % mengalami tindak kekerasan seksual, 26,11 % anak mengalami tindak kekerasan psikis, 25 % anak mengalami tindak kekerasan fisik di sekolah. Kurang Tersedianya Sarana dan Prasarana Seperti belum lengkapnya ruang sudut baca di setiap kelas, kurangnya tempat tanam bermain.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi Kemudian, dengan mengkombinasikan dua kata tersebut ke dalam bahasa Inggris, lahirlah kata *administer* dan kata bendanya *administration*. Kata "ad" pada awal kata *minister* berarti membantu atau menambah (Dimock & Demock, 1998:21). Di dalam bahasa Inggris-Indonesia oleh John M. Echol dalam Hasan Shadly (1992:1) *to manage* artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, 2) *to conduct* artinya memimpin dan mengadakan, 3) *to direct* artinya menunjukkan serta mengatur. Menurut Stephen P. Robbins (1983) "Administrasi is the universal process of efficiency getting activities completed with

and through other people". Robbins memahami administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain.

Konsep Organisasi

Organisasi Menurut (Siagian, 2019) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. (Malawat, 2022) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Menurut (Indayani, 2018) organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Widiana, 2020) organisasi merupakan sistem pengetahuan, dimana manusia dapat mengetahui struktur tatapembagian kerja dan struktur tata-hubungan kerja sehingga mampu menerapkan sistem organisasi secara tepat. Menurut (Indayani, 2018) organisasi juga bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Sedangkan Menurut Hasibuan (No & Pat, 2021) organisasi adalah sebagai proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry dalam Hadari Nawawi (2000:36), "Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Konsep Kebijakan

Kebijakan publik adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24).

Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda, kebijakan atau kebijaksanaan publik mempunyai arti yang beraneka ragam. Menurut Amir Santoso sekurangnya ada dua macam pendapat mengenai kebijakan publik ini. Pertama adalah pendapat dari mereka yang memandang kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah dan yang kedua adalah dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan

(Ekowati, 2009:5). Menurut Kurniawan (pada Florencia 2015) efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi menurut dalam suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sementara Effendy (2003) mengungkapkan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan menggunakan biaya yang dianggarkan, saat yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alata-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat dan kapan waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. (Abdullah, 2014).

Program

Menurut Hunger, J David & Whelen, Thomas L (2012:27) mengatakan program adalah pernyataan aktivitas atau langkah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Adapun ciri-ciri program yang baik menurut Tjkromidjojo (dalam budi: 2016) ialah:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
- d. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
- e. Hubungan dengan kegiatan dalam usaha pembangunan dan program lainnya, suatu program tidak dapat berdiri sendiri
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa program sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Sebelum suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaan agar program yang direncanakan dapat berjalan baik.

Penemuan Hak Anak (PHA)

(Patilima, 2019) adapun hal yang melatarbelakangi terciptanya Program Pemenuhan Hak Anak ini karena pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan kemudian ditetapkan sebagai Hari Anak Sedunia. Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak melalui Konvensi Hak Anak (KHA) tingkat internasional. Konvensi tersebut disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor

36 Tahun 1990 Tentang Konveksi Hak Anak yang berisi tentang penjaminan, pengakuan, dan proteksi serta pemenuhan hak-hak anak seperti hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Hal ini juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA)

Menurut Ratnasari Diah Utami, dkk, dalam jurnal Implementasi Penerapan Sekolah Ramah Anak pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (2017), Sekolah Ramah Anak Memiliki Lima Ciri, Yaitu :

- a. Adanya perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan. Dikutip dari jurnal Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan (2011) karya Kristanto dan kawan-kawan, tenaga kependidikan harus memberikan perlakuan yang adil kepada murid laki-laki dan perempuan. Perlakuan adil ini artinya memberi kasih sayang, perhatian, dan pembelajaran yang setara, tanpa membedakan agama, kondisi ekonomi, kondisi fisik, dan budaya dari anak tersebut. Tidak hanya itu, seluruh tenaga kependidikan juga harus menghormati hak anak dan juga melindunginya.
- b. Proses pembelajaran yang baik sehingga anak merasa nyaman Suasana pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin supaya anak merasa nyaman, aman, lebih aktif dan kreatif, serta lebih percaya diri. Agar bisa tercapai, hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif.

Contohnya aktivitas pembelajaran di luar ruangan, guru menggunakan alat bantu supaya pembelajaran lebih menarik, menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk aktivitas pembelajaran, menggunakan permainan untuk menarik minat anak, dan lain sebagainya.

Metode

penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Pelaksanaan Dalam Program Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak (Studi Sekolah Dasar Negeri 182) Kota Pekanbaru”. Metode Kualitatif menurut Johnny Saldana (2011) dalam (Sugiyono, 2020) merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.

Hasil dan Pembahasan

1. Tanggapan Responden Mengenai Program Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak (Studi Sekolah Dasar Negeri 182) Kota Pekanbaru.
 - a. Mampu menurunkan angka kekerasan anak Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Dina Septiana, S.STP, M.Si Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru pada Selasa, 16 Januari 2024, beliau mengatakan sebagai berikut :“kekerasan pada anak di dunia pendidikan memang masih ada akan tetapi tidak terlalu begitu banyak maka dari itu adanya sekolah ramah anak adalah salah satu upaya untuk membantu mengurangi kekerasan pada anak di dunia pendidikan”. Berdasarkan pernyataan dari key informan dapat kita ketahui bahwa masih adanya kekerasan pada anak di dunia pendidikan akan tetapi berdasarkan keterangan key informan bahwasanya angka kekerasan pada anak di dunia pendidikan sudah menurun akan tetapi dapat kita lihat bahwa kekerasan pada anak dalam dunia pendidikan masih ada, hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi dinas untuk lebih memantau pelaksanaan program pemenuhan hak anak khususnya melalui sekolah ramah anak.

- b. Mampu Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Secara Merata Dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Isma, S.Hum sebagai tenaga pendidik selaku informan dalam penelitian ini menambahkan : “Menurut saya selaku tenaga pendidik bahwasanya para pelaksana pemenuhan hak anak ini sudah mampu menjalankan akan tetapi untuk pemerataan pemenuhan hak anak saya juga tidak menjamin sudah merata dikarenakan masih banyaknya beberapa hak anak yang belum terpenuhi, saya melihat dari sudut pandang seorang tenaga pendidik bahwasanya jika memang para pelaksana mampu melakukan pemerataan pemenuhan hak anak secara otomatis tidak ada lagi yang namanya ada yang belum merasakan bangku sekolah “ Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa para pelaksana belum mampu dalam melakukan pemerataan secara merata terhadap pemenuhan hak anak tersebut dikarenakan beberapa kendala salah satunya masih adanya anak-anak yang tidak sekolah

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dilanjutkan pernyataan oleh Ibu Reli Sugianti, SKM.MKM sebagai kepala seksi sekolah ramah anak selaku key informan diwawancarai peneliti pada 16 Januari 2024 menyatakan bahwa : “Terkait ketersediaan sarana dan prasarana di DP3APM menurut saya memang belum begitu lengkap karena kita juga lagi membenahi baik dari sarana dan prasarana karena yang kita ketahui bersama bahwasanya DP3APM ini baru saja pindah dan ketersediaan sarana dan prasarana memanglah belum lengkap akan tetapi tidak menjadi kendala bagi kami dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan”. Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa memang untuk ketersediaan sarana dan prasarana di DP3APM sedang dalam pembenahan dan bagi mereka kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana tidak menjadi kendala dalam melaksanakan tugasnya.

2. Ketersediaan Anggaran

Dilanjutkan pernyataan oleh Ibu Reli Sugianti SKM.MKM sebagai kepala seksi sekolah ramah anak selaku key informan diwawancarai oleh peneliti pada 16 Januari 2024 menambahkan :“Mengenai anggaran yang sudah disediakan sudah terealisasi salah satunya yaitu pada kegiatan evaluasi kegiatan sekolah ramah anak akan tetapi ada keterbatasan anggaran yang dimana kami dari pihak sekolah ramah anak tidak bisa melakukan monitoring secara keseluruhan dan juga tidak bisa melakukan evaluasi satu persatu diseluruh sekolah di kota Pekanbaru ini karena keterbatasan anggaran, akan tetapi anggaran yang belum terealisasi pada waktu pandemi covid akan di

realisasikan pada kegiatan tahun berikutnya". Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa adanya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program kerja akan tetapi anggaran yang tidak terealisasi itu akan dipergunakan pada kegiatan tahun berikutnya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa adanya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program kerja akan tetapi anggaran yang tidak terealisasi itu akan dipergunakan pada kegiatan tahun berikutnya.

3. Tupoksi

Selanjutnya di lanjutkan oleh ibu Gusneti S.Pd.SD selaku key informan pada 4 Desember 2023 melanjutkan : "Terkait bagaimana tupoksi di sekolah dasar negeri 182 kota Pekanbaru ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu masi ada beberapa tugas dan fungsi tenaga pendidik tidak berdasarkan keahliannya salah faktor terjadinya ketidaksesuaian tugas dan fungsi tersebut karena adanya kekurangan sumber daya manusia terkait dalam proses kegiatan sekolah ramah anak maka dari itu ada beberapa tenaga pendidik yang harus menjalankan tugas tidak sesuai dengan keahliannya demi menjalankan program pemenuhan hak anak dalam kegawatan sekolah ramah anak". Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa adanya ketidaksesuaian tugas dan fungsi dalam menjalankan program pemenuhan hak anak khususnya dalam kegiatan sekolah ramah anak ini menjadi salah satu tugas berat dari pihak sekolah untuk bagaimana dalam menyelesaikan hal ketidaksesuaian tugas dan fungsi tersebut karena merugikan dari beberapa pihak tenaga pendidik.

4. Berpartisipasi

Wawancara lebih mendalam oleh Ibu Gusneti S.Pd.SD selaku kepala sekolah dasar negeri 182 kota Pekanbaru sebgai informan dan peneliti mewawancarai pada Desember 2023 , informan memberikan pernyataan terkait partisipasi: "Dalam menyelenggarakan kegiatan sekolah ramah anak ini tentunya perlu partisipasi dari berbagai pihak mulai tenaga pendidik hingga orang tua murid karena dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yaitu pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak dan menurut saya bukan hanya tenaga pendidik saja yang terlibat dalam berpartisipasi akan tetapi orang tua dari murid Perlu juga,dan khususnya di sekolah ini partisipasi dari tenaga pendidik sudah cukup baik dimulai dengan tanggung jawab seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang mengedepankan pemenuhan hak anak begitu juga dengan orang tua murid berpartisipasi dalam membantu menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yg seharusnya itu menjadi tugas bagian sekolah akan tetapi orang tua murid mengambil bagian itu menjadi salah satu bentuk partisipasi mereka". Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa bentuk partisipasi khususnya dalam kegiatan sekolah ramah anak di sekolah dasar negeri 182 kota Pekanbaru sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan terlihat bahwa partisipasi tidak hanya datang dari tenaga pendidik akan tetapi dari pihak orang tua murid juga terlibat didalamnya.

5. Akuntabilitas

Selanjutnya dilanjutkan oleh ibu Gusneti S.Pd.SD selaku kepala sekolah di sekolah dasar negeri 182 kota Pekanbaru sebagai key informan pada 16 Desember 2023 melanjutkan :

“Menurut pandangan saya selaku kepala sekolah melihat bahwa terkait akuntabilitas pegawai atau tenaga pendidik di sekolah ini sudah cukup baik jadi menurut saya tidak adanya permasalahan terkait akuntabilitas pegawai”. Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwasanya tidak adanya permasalahan terkait akuntabilitas pegawai artinya akuntabilitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah baik.

6. Kecepatan dan Kesiapan

Mengerjakan Tugas Selanjutnya di lanjutkan oleh ibu Isma S.Hum sebagai tenaga pendidik di sekolah dasar negeri 182 kota Pekanbaru selaku informan pada 4 Desember 2023 menyatakan: “Untuk kesiapan kerja sendiri menurut saya selaku tenaga pendidik kami siap dalam tuntutan kerja akan tetapi kami juga dari tenaga pendidik ingin adanya pelatihan khususnya terkait dalam pelaksanaan sekolah ramah anak untuk manambah soft skil kami sebagai tenaga pendidik “. Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwasanya untuk kesiapan tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak sudah siap akan tetapi mereka membutuhkan pelantikan sebagai soft skil dalam melaksanakan tugasnya.

7. Pesan dan Penyampaian

Pesan yang disampaikan dan pemahaman pesan mengandung arti bahwasanya disini adanya interaksi berkomunikasi yang baik dilihat dari bagaimana seorang pemimpin dalam berkomunikasi dengan bawahannya dan bagaimana pesan itu tersampaikan dengan baik..

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukan bahwa pelaksanaan program pemenuhan hak anak melalui kegiatan sekolah ramah anak (studi sekolah dasar negeri 182) kota Pekanbaru , yang di dapat dari hasil penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi, terdapat 6 indikator dalam penelitian ini yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi , Ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan sudah sesuai dengan jukrnis sekolah ramah anak yang sudah ditetapkan oleh DP3APM, akan tetapi mengenai sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak masih kurang yang disebabkan oleh karakteristik organisasi pelaksana kurang adanya perhatian lebih terkait pelaksanaan sekolah ramah anak tersebut maka para sikap pelaksana dapat dinilai kurang baik dalam mejalankan kegiatan sekolah ramah anak tersebut juga dalam komunikasi antar organisasi belum bisa dianggap baik karena adanya ketidaksesuaiaan intruksi dan pesan yang diterima antar organisasi ,dan masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang dalam menunjang proses pelaksanaan sekolah ramah anak,dan Anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak, dikarenakan terbatasnya anggaran makan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan sekolah ramah anak ke seluruh sekolah yang ada di Pekanbaru dengan itu menjadi permasalahan bagi tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak dan tidak adanya tim pengawasan dalam kegiatan sekolah ramah anak tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta 1982 Erma Widiana, M. (2020). *Pengantar Manajemen*.
- Hajar Malawat, S. (2022). *Buku Pengantar Administrasi Publik*. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Retrieved from http://eprints.uniskabjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah

kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.

- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk

Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.

- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru

Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada

Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta, Andi.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 1992, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Nor, Ghofur. 2014. *Manajemen Publik Pada Pemerintah*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Patilima, H. (2019). [2019] Hamid P_ Kota Layak Anak_ Neliti. 39-55.
- Rahmayuni, S. (2017). STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2014. 4. Retrieved from <https://ejournal.bioscientifica.com/view/jo>

urnals/eje/171/6/727.xml.

Stephen P. Robbins, 1983. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Siagian, P. (2019). *Filsafat Administraasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Terry, G. R. (2021). *Dasar Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.